



## Catatan 2019 dan Harapan 2020

Oleh  
**The Habibie Center**

### Pendahuluan

Memasuki tahun 2020, pemerintah Indonesia perlu melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi situasi sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang tak menentu. Karena itu, refleksi yang serius diperlukan sebagai upaya membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih kokoh dan berkualitas. Awal tahun baru merupakan momen pelaksanaan tradisi intelektual di kalangan akademisi dan lembaga penelitian di Indonesia untuk melakukan refleksi kritis terhadap sejumlah isu yang mengemuka pada satu tahun ke belakang, sekaligus mengemukakan pandangan dan harapan perjalanan bangsa selama satu tahun ke depan.

### Bidang Ekonomi

Sepanjang tahun 2019, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam segi eksternal, terdapat sejumlah faktor yang ikut memberi dampak pada ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan permintaan dan stagnasi harga komoditas dunia, serta krisis ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin. Sedangkan dari segi internal, tantangan yang dihadapi mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga tidak tercapainya target pendapatan dari sektor perpajakan.

Di sejumlah kesempatan, pemerintah telah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 tumbuh di kisaran 5,04-5,07 persen. Angka tersebut berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,3 persen. Sementara itu, inflasi tetap terjaga di angka 3,1 persen dengan diiringi penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Yang perlu dicermati bersama





adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III yang hanya mencapai 5,01 persen, dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang selama ini berkontribusi rata-rata 54-56 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Selain itu, kinerja ekspor dan impor juga perlu diwaspadai seiring dengan perlambatan aktivitas manufaktur di tanah air.

Ketika dipastikan terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan prioritas utama di periode kedua adalah persoalan investasi. Pada penghujung periode pertama menjabat sebagai presiden, ia berkali-kali mengeluhkan capaian investasi yang masih melemah. Padahal, investasi menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ketika memberikan pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center pada Juli 2019, Presiden Joko Widodo kembali menekankan urgensi investasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pembukaan lapangan pekerjaan secara luas. Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada lagi pihak yang alergi terhadap investasi. Ia juga menegaskan tidak akan segan untuk memangkas seluruh hambatan investasi, menggencarkan reformasi birokrasi, serta memecat pejabat dan membubarkan lembaga yang dianggap mengganggu proses tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan tahun 2015-2019, investasi diproyeksikan akan tumbuh 8,1 persen pada tahun 2015, 9,3 persen pada tahun 2016, 10,4 persen pada tahun 2017, 11,2 persen pada tahun 2018, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dengan proyeksi tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi 2015-2019 menurut target RPJMN mencapai nilai 7 persen. Namun, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir masih di berada kisaran 5 persen.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, di tahun 2015 realisasi investasi mencapai 545,5 triliun rupiah. Capaian itu melebihi target pemerintah sebesar 519,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016, capaian investasi tumbuh sedikit melambat sebesar 12,4 persen menjadi 612,8 triliun rupiah. Pada tahun 2017, realisasi kembali tumbuh lebih baik sebesar 13,1 persen menjadi 692,8 triliun rupiah.

Namun pada tahun 2018, realisasi pertumbuhan investasi anjlok sebesar 4,1 persen saja, dengan total investasi tahunan tercatat mencapai 721,3 triliun rupiah. Akibat perlambatan realisasi investasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 juga tercatat sebesar 5,17 persen - di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen. Sementara itu, hingga kuartal I tahun 2019 realisasi investasi tercatat meningkat 5,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai total investasi di kuartal I tahun 2019 mencapai 195,1 triliun rupiah. Melihat kondisi tersebut, para kalangan pelaku





usaha dan bisnis tentu sangat menantikan bagaimana strategi pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua untuk menggenjot realisasi investasi selama lima tahun mendatang.

Selain persoalan investasi, pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian utama pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan tetap berada di atas 5 persen di tengah perlambatan ekonomi dunia. Dalam laporan kuartal Bank Dunia edisi Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada pada angka 5,1 persen di tahun 2020. Kondisi perekonomian global tidak menentu akibat ketegangan perdagangan internasional dinilai berimbas pada perlambatan pertumbuhan domestik Indonesia.

## **Bidang Sosial dan Politik**

Kaleidoskop politik satu tahun belakang memotret berbagai realitas politik yang penuh ketegangan dan paradoks. Ketegangan karena kompetisi politik yang terjadi begitu ekstrem mengakibatkan terjadinya polarisasi dua kelompok: pendukung calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebutan *cebong* dan *kampret* pun muncul sebagai penanda keberpihakan politik seseorang sebagai pendukung Joko Widodo atau pendukung Prabowo Subianto.

Realitas politik penuh ketegangan itu juga melahirkan paradoks, karena terjadi permufakatan politik di antara kedua pihak yang selama ini bertikai. Kompetisi politik elektoral berakhir bahagia melalui sikap politik akomodatif sebagaimana tercermin dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Pemilu sebagai kompetisi elektoral tidak lagi menjadi *medium rewards and punishment* bagi para kontestan politik yang terlibat di dalamnya. Atas nama rekonsiliasi dan persatuan, “bagi-bagi kue” kekuasaan dilakukan dengan merangkul rival politik untuk masuk ke dalam kabinet.

Setelah presiden dan wakil presiden dilantik serta kabinet dibentuk, berbagai pihak tentu ingin mengetahui bagaimana wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Berdasarkan pidato kemenangan dan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden bulan Agustus lalu, ekonomi masih menjadi prioritas utama di periode kedua pemerintahan ini. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, menggenjot investasi, dan pertumbuhan ekonomi di atas 5% merupakan sejumlah narasi andalan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi.

Akan tetapi, berbanding terbalik dengan bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo hampir tidak pernah mengungkapkan secara lugas mengenai hal-hal apa yang ingin ia capai di bidang politik pada periode





kedua pemerintahan ini. Persoalan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi juga luput dari narasi utama di dalam berbagai pidato Presiden Joko Widodo pasca terpilih kembali. Perhatian Joko Widodo terhadap agenda pemberantasan korupsi terkesan seadanya dan 'tebang pilih', salah satunya dalam hal pemberantasan pungutan liar yang masih sejalan dengan tujuannya untuk melakukan deregulasi besar-besaran di bidang ekonomi. Ia menilai pungutan liar sebagai virus yang menjangkiti birokrasi pemerintahan dan dapat menghalangi investasi luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

Sikap Presiden Joko Widodo kemudian menimbulkan pertanyaan: mengapa ia lebih mengutamakan masalah ekonomi dibandingkan dengan isu pemberantasan korupsi, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta isu-isu strategis lain di bidang sosial dan politik? Apakah keputusan Presiden untuk lebih mengutamakan ekonomi di periode kedua pemerintahannya merupakan cerminan kesungguhan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) menjadi negara maju di masa depan?

Isu ekonomi seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan isu yang relatif mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Karena itu, Presiden Joko Widodo dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik, baik dari parlemen maupun internal koalisi pemerintahan saat ini. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan isu ekonomi, masalah pemberantasan korupsi dan HAM dapat dikatakan sebagai isu yang sangat sensitif bagi sekelompok orang. Sehingga dukungan politik terhadap isu-isu tersebut juga akan cenderung sulit diperoleh Joko Widodo apabila ia memutuskan untuk menekankan fokusnya pada hal-hal tersebut di periode kedua pemerintahannya.

Kondisi dilematis tersebut kemudian bertemu dengan realitas politik bahwa pada lima tahun mendatang Presiden Joko Widodo tidak lagi dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ketika menjalani periode pertama pemerintahan, ia masih memiliki motivasi untuk menuai insentif elektoral publik dengan menunjukkan perhatian dan rasa peduli terhadap isu-isu HAM dan pemberantasan korupsi. Namun, kini motivasi untuk menuai insentif elektoral tidak ada lagi seiring bergulirnya periode kedua pemerintahan.

Tepat di titik inilah kekuatan oligarki politik memanfaatkan ketidakpedulian Presiden Joko Widodo terhadap isu-isu strategis di bidang politik sebagaimana disampaikan di atas. Kekuatan oligarki politik ini tidak sekadar memiliki kekuasaan atas partai-partai politik, namun mereka juga berada di luar partai politik dengan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi, sehingga memiliki pengaruh besar dalam menentukan bagaimana tampilan wajah pemerintahan selama lima tahun mendatang.





Dengan kondisi yang ada, apakah sikap Presiden Joko Widodo untuk lebih mengutamakan masalah-masalah ekonomi ketimbang isu pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan isu sosial politik lainnya tidak lebih dari sekadar strateginya agar tidak terlibat dalam konflik terbuka secara langsung dengan kekuatan politik di parlemen dan elit partai politik di koalisi pemerintahan? Perjalanan pemerintahan di periode kedua selama lima tahun mendatang akan menjawab hal tersebut.

Di tahun 2019, Indonesia mencatatkan keberhasilan dalam melaksanakan pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden pada 17 April 2019. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemilu serentak tanggal 17 April 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum dasar. Untuk kali pertama bangsa Indonesia menggelar pemilu secara serentak dalam satu waktu bersamaan untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI. Keserentakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 /PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2014. Saat itu, Mahkamah Konstitusi menilai norma pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan setelah pemilihan legislatif tidak sesuai dengan semangat konstitusi di Pasal 22E ayat (1), (2), dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Sejak sebelum pelaksanaannya, muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak terhadap kemungkinan terjadinya konflik sosial terkait dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Kekhawatiran muncul mengingat ketegangan dan polarisasi selama delapan bulan masa kampanye yang terasa begitu kuat. Dalam tataran pelaksanaannya, pemilu serentak 17 April lalu pun menghadirkan berbagai kerumitan dan persoalan yang tidak terduga. Salah satu persoalan yang paling menjadi perhatian adalah ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah di Indonesia yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalani proses pemungutan dan penghitungan suara.

Persoalan lain yang juga tidak kalah krusial adalah kebingungan yang dihadapi oleh para pemilih dari segi administratif. Sebagaimana diketahui, dalam pemilu serentak tersebut para pemilih menerima lima kertas suara untuk dicoblos di bilik suara, guna memilih pejabat publik eksekutif dan legislatif. Kebingungan pemilih kemudian tercermin dari jumlah surat suara tidak sah yang diterima. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara tidak sah dalam pemilihan presiden/wakil presiden mencapai 3.754.905 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah dalam pemilu legislatif mencapai angka 17.503.953 suara.





Sejumlah persoalan dari pelaksanaan pemilu serentak kemudian direspons oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan partai politik di DPR-RI. Pemisahan kembali pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilu legislatif pun disuarakan oleh kalangan elit politik. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana disepakati oleh pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 menjadi pintu masuk untuk pembahasan isu tersebut. Namun, apakah pemisahan kembali pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif merupakan jalan keluar paling baik agar berbagai persoalan dari pelaksanaan pemilu serentak lalu tidak terulang kembali pada lima tahun mendatang? Ataukah ada pilihan lain yang lebih ideal? Diskursus dan debat mengenai hal tersebut akan mewarnai perjalanan politik bangsa Indonesia selama satu tahun ke depan.

Beberapa insiden konflik sosial juga terjadi sepanjang tahun 2019, seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kerusuhan awalnya dipicu oleh insiden rasialisme dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Sejumlah aparat keamanan dan organisasi massa melakukan kekerasan verbal terhadap para mahasiswa tersebut, sebelum akhirnya menerjang kediaman mereka secara paksa dan menangkap mereka. Peristiwa itu juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat masih dihalangi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan melakukan intimidasi, persekusi, dan kekerasan secara verbal maupun fisik. Di Papua, berbagai kelompok merespons peristiwa di kedua kota di Jawa Timur tersebut dengan melakukan demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan.

Adapun dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia menghadapi tiga isu penting sepanjang tahun 2019, yaitu: (1) persoalan repatriasi kelompok pendukung ISIS di Suriah; (2) antisipasi berbagai paham radikal-ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan (3) antisipasi serangan-serangan teroris di Indonesia. Hal-hal tersebut harus terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang dengan memperkuat kapasitas kelembagaan terkait, melakukan koordinasi antar-lembaga, dan meningkatkan kapasitas aparat keamanan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil karena isu ekstremisme-terorisme harus direspons secara inklusif.

## **Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Bidang pertahanan dan keamanan telah menjadi salah satu fokus pembangunan utama selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di tahun 2019, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla berhasil merampungkan sejumlah rencana strategis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional tahun 2015-2019. Dalam hal modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tahun 2019





menjadi tahun capaian kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*/MEF) di angka yang cukup menjanjikan, yakni 63,37 persen. Tingkat kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan kekuatan pokok minimum juga terus meningkat. Sejumlah capaian penting di sektor industri pertahanan berhasil diraih di tahun 2019, termasuk peluncuran Kapal Selam KRI Alugoro-405 di mana proses pembuatan kapal tersebut dilakukan di PT. PAL Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri galangan kapal.

Dalam hal adaptasi organisasi, sejumlah komando baru diresmikan di tahun 2019, termasuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang menjadi salah satu Komando Utama Operasi TNI (Kotamaops) serta Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus). Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional juga kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan tren positif menuju TNI yang semakin modern dan profesional serta sistem keamanan nasional yang semakin matang.

Meskipun demikian, sejumlah pekerjaan rumah mendesak di bidang pertahanan dan keamanan masih menunggu dalam daftar antrian untuk dituntaskan. Pemerintah perlu segera memikirkan dan merumuskan rencana pembangunan kekuatan pertahanan pasca pemenuhan kekuatan pokok minimum di tahun 2024. Langkah awal telah diambil dengan meningkatkan anggaran pertahanan di tahun 2020 senilai 131,2 triliun rupiah. Peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap juga perlu diikuti dengan reformasi komposisi anggaran.

Selain itu, konsolidasi demokrasi dan hubungan sipil-militer demokratis juga masih menjadi tantangan. Kekhawatiran tentang potensi politisasi kebijakan pertahanan mengemuka ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Penunjukan sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri untuk mengisi jabatan-jabatan setingkat menteri juga memicu keraguan tentang komitmen pemerintah dalam merampungkan agenda reformasi militer. Tahun 2020 akan menjadi tahun krusial yang menentukan arah pembangunan sistem pertahanan dan keamanan nasional dalam lima tahun ke depan.

## **Bidang Luar Negeri**

Di bidang luar negeri, Indonesia telah menghasilkan sejumlah pencapaian utama sepanjang tahun 2019, khususnya di tingkat Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Outlook atau Pandangan ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada bulan





Juli 2019. Terdapat sejumlah poin utama yang tercantum dalam Pandangan ASEAN, yaitu: (1) perspektif ASEAN yang memandang wilayah Asia-Pasifik dan Samudera Hindia bukan hanya sebagai kawasan yang terdiri dari sejumlah negara yang sekadar bersinggungan, namun sebagai kawasan yang saling berhubungan dan terintegrasi dengan ASEAN sebagai titik pusat; (2) mengedepankan kawasan Indo-Pasifik yang berbasis dialog dan kerja sama, bukan persaingan; (3) menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang maju dan makmur, dan (4) menekankan arti penting perspektif kemaritiman dalam arsitektur kawasan semakin berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa masih terdapat keraguan terhadap nilai-nilai strategis Pandangan ASEAN dan apa hasil konkret yang dapat diharapkan. Tantangan bagi pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah bagaimana cara menerapkan prinsip dan tujuan ke dalam tindakan yang nyata.

Tahun 2019 juga ditandai dengan peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pembangunan gedung yang didanai penuh oleh pemerintah Indonesia tersebut seolah menjadi jawaban atas keraguan sejumlah pihak akan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap ASEAN. Dengan adanya gedung sekretariat baru, Presiden Joko Widodo berharap agar berbagai rapat dan pertemuan ASEAN dilakukan di Jakarta alih-alih di ibukota negara ASEAN lain.

Mengenai agenda politik luar negeri ke depan, setelah diangkat kembali sebagai Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjabarkan kebijakan politik luar negeri tahun 2019-2024 dengan nama Rumusan 4+1. Rumusan 4+1 adalah: (1) penguatan diplomasi ekonomi; (2) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri; (3) mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia; dan (4) meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia serta plus 1 adalah reformasi struktural. Prioritas pertama – diplomasi ekonomi – akan menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun mendatang. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya peningkatan angka perdagangan dan investasi masuk ke Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar untuk meningkatkan angka perdagangan dan investasi masuk dalam kurun waktu satu tahun, namun terdapat sejumlah pihak yang meragukan apakah target tersebut realistis. Mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Mahendra Siregar untuk melapor langsung kepada Istana juga menimbulkan pertanyaan mengenai wewenang Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Di saat yang bersamaan, terdapat kekhawatiran bahwa segala upaya yang dilakukan para diplomat untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan bisnis dan investasi akan sia-sia jika tantangan dan rintangan di tingkat nasional belum diatasi oleh pemerintah pusat.





Selain fokus pada diplomasi ekonomi, pemerintah Indonesia juga perlu menyoroti isu keamanan global dengan statusnya sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Ketidakpastian dalam isu-isu global diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk bersikap tegas terhadap sejumlah isu terkait, seperti sikap diskriminasi dan penindasan terhadap Muslim Uighur, penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, dan kemunduran demokrasi di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

## Analisis

Pemerintahan Jokowi telah melalui tahun 2019 dengan menorehkan sejumlah pencapaian positif. Pelaksanaan pemilu serentak yang demokratis, kemajuan di bidang pertahanan dan keamanan, serta keberhasilan diplomasi di bidang luar negeri merupakan beberapa hal yang patut diapresiasi dari pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat kekhawatiran atas kondisi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang belum menggembirakan akibat perlambatan ekonomi dunia. Selain itu, perhatian lebih juga harus diberikan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan ancaman terorisme. Ketika memasuki masa jabatan kedua, sebagaimana tercermin dalam pidato pelantikan, Presiden Joko Widodo secara eksplisit menempatkan persoalan ekonomi seperti kelanjutan pembangunan infrastruktur dan investasi dalam skala prioritas tertinggi dalam menjalani pemerintahan selama lima tahun ke depan. Akan tetapi, pemerintah diharapkan untuk tetap menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan di bidang lain terutama politik dan hukum.





# THC INSIGHTS

**THC Insights** are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

**The Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

**Contact:**

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: [thc@habibiecenter.or.id](mailto:thc@habibiecenter.or.id)

Website: [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)